

## BPK Telisik Indikasi Kebocoran Retribusi Sektor Pariwisata di NTB



<https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282931/BPK.Telisik.Indikasi.Kebocoran.Retribusi.Sektor.Pariwisata.di.NTB/?amp>

Mataram (Suara NTB) – Pariwisata jadi sektor unggulan, namun tak berkontribusi maksimal untuk menggenjot pendapatan daerah. Indikasi kebocoran mengemuka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk untuk melakukan audit khusus.

Audit<sup>1</sup> diawali di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai salah satu daerah dengan destinasi wisata unggulan NTB. Selanjutnya akan bergilir ke daerah daerah lain di NTB, bertujuan mengecek rasio arus wisatawan dengan pemasukan keuangan daerah.

Penegasan itu disampaikan Anggota VI BPK RI Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A saat meresmikan ruangan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Gedung BPK NTB, Senin, 23 Desember 2019.

Audit akan menyeluruh pada penggunaan sarana dan prasarana pariwisata, pajak hotel, restoran atau tempat hiburan lainnya, sumber keuangan lain dari karcis pintu masuk objek wisata. Selain dari hilir, juga sampai ke hulu berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pemasukan sektor pariwisata. “Kita akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” ujarnya.

Salah satu destinasi<sup>2</sup> yang dibidik adalah Gili Trawangan, pulau kecil eksotik yang jadi favorit dominan wisatawan asing. Didampingi Kepala BPK NTB, Hery Purwanto dan jajaran, Harry Azhar Azis menjelaskan, saat ini audit masih berlangsung. Lombok Utara sebagai objek awal, setelah itu akan bergerak ke daerah daerah lain.

Segmen yang akan diusut, seperti pemasukan riil berdasarkan identifikasi potensi pendapatan<sup>3</sup> daerah dari sektor pariwisata. Mantan Kepala BPK RI ini mencontohkan, potensi pemasukan daerah Rp 1 miliar, namun hanya masuk ke kas daerah Rp 100 juta. “Nah, kemana Rp900 jutanya? Itu yang bisa diaudit,” jelasnya.

Jika ditemukan ada kejanggalan berupa kebocoran, memang kewenangannya tidak akan sampai pada penyidikan dan penetapan tersangka, karena itu akan jadi ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Tapi sebelum APH masuk, akan diawali dengan audit investigasi oleh timnya di NTB untuk anatomi potensi fraud dan memperdalam unsur pidana. ‘‘Nah, itu (hasil investigasi) yang kita rekomendasikan ke APH. Kita laporkan,’’ tegasnya. Atau bisa sebaliknya.

‘‘Kalau APH menemukan data, bukti bukti peyelewengan awal, kita akan lakukan audit investigasi,’’ tandasnya.

Pada kesempatan sama, mantan anggota DPR RI ini diminta meresmikan dan menyaksikan ruangan PIK, yang di dalamnya difungsikan sebagai server pusat informasi pariwisata NTB. Ia mengaku menjadi inisiator penyediaan perangkat informasi pariwisata di ruangan PIK pada Gedung BPK. Pengunjung dari mana pun, dapat mengakses informasi tentang objek wisata favorit di NTB sekaligus menjadi referensi audit jajarannya di BPK NTB.

Soal audit objek wisata ini, Kepala BPK NTB Hery Purwanto mengatakan bahwa, tiga segmen jadi perhatian pihaknya dalam proses audit sektor pariwisata mendatang. Pertama, terkait proses pengelolaan sektor pariwisata, lebih khusus mengenai detinasi dan promosi. Kedua, auditor akan mengecek peran serta masyarakat, khususnya lingkaran destinasi. Ketiga, mengecek langsung aliran dana dari objek ke kantong PAD.

Pihaknya akan mencermati secara khusus pemasukan daerah dari PAD pada sektor pariwisata. Baik melalui karcis masuk, akomodasi dan transportasi di destinasi wisata.

Diakuinya, audit belum mengarah ke tindak lanjut atas temuan atau karena ada temuan awal. Tapi audit ini merupakan pendahuluan yang membutuhkan observasi awal sebelum menilik lebih detail pada sumber pemasukan PAD.

BPK melihat pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemprov NTB sesuai yang tertuang dalam visi misi NTB Gemilang. Saatnya pihaknya turut memberikan atensi, karena bagaimana pun juga kuat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat jika sektor pariwisata dikelola dengan baik. (ars)

### **Catatan**

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. [vide: psl 1 angka 9 UU 15/2006 BPK]

Dalam pasal 6 UU 15/2016 BPK bertugas dan berwenang:

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.[vide: pasal 6 ayat (1) UU BPK]

2. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. [vide: pasal 6 ayat (1) UU BPK].

Selanjutnya dalam pasal 7 UU 15/2006 BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada

1. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.[vide ayat (1)]
2. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. .[vide ayat (2)]

Berikutnya dalam pasal 8 ayat (3) UU BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum

*“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut”.*

## Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282931/BPK.Telisik.Indikasi.Kebocoran.Retribusi.Sektor.Pariwisata.di.NTB/?amp/24/12/2019>

## Catatan Akhir/End Note

---

<sup>1</sup> audit/au·dit/ n 1 pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; 2 pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;

-- balas jasa tinjauan berkala oleh konsultan atas gaji, upah, dan tunjangan;

-- keuangan pengujian kebenaran pembukuan;

-- pemasaran penilaian strategi pemasaran, jasa, fungsi, dan hasilnya [vide: <https://kbbi.web.id/audit>]

<sup>2</sup> destinasi/des·ti·na·si/ /déstinasi/ n tempat tujuan; tempat tujuan pengiriman [vide: <https://kbbi.web.id/destinasi>]

<sup>3</sup> anggaran/ang·gar·an/ n 1 perkiraan; perhitungan; 2 aturan; 3 Ek taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang; 4 Man rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang; ~ belanja perhitungan banyaknya uang yang akan masuk dan yang akan dikeluarkan; ~ belanja berimbang anggaran belanja dengan penerimaan dalam periode tertentu sama atau melampaui pengeluaran pada periode yang sama; ~ dasar peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya); ~ induk Man perpaduan anggaran yang meliputi berbagai bidang, misalnya bidang penjualan, bidang produksi, bidang operasi, dan bidang nonoperasi; ~ keluarga Sos pengeluaran anggota keluarga yang sudah diperhitungkan sehingga memudahkan untuk membuat perencanaan pengeluaran rumah tangga; ~ **pendapatan** perhitungan banyaknya uang yang akan diterima; ~ rumah tanggaMan peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya); ~ sulapan anggaran yang disulap (yang mencantumkan daftar pengeluaran yang jauh lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya); [vide: <https://kbbi.web.id/anggaran>]